

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI DESA
ALAHAIR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2011-2015**

Iin Nurbaity
E-mail: iin_8cS@ymail.com
Pembimbing : Drs. M.Y Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The purpose of conducting this research was to know Kabupaten Kepulauan Meranti local government coordination of tidal flood prevention in Desa Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi in 2011-2015. The main problem found in this research was less of communication that occurred in the handling of tidal flood prevention in Desa Alahair meanwhile the area affected by tidal flood was getting worse due to the abrasion. The theory used in this research was government management, government coordination and disaster management. This research used analytical descriptive method with qualitative research type. The type of data used in this research was primary data and secondary data generated through the results of direct interviews with informants who knew and understood the problems in the field, documentation and observation.

Based on the explanation above, it can be concluded that the relationship affected the implementation of tidal flood prevention were several interrelated functions namely planning and coordination, organizing and coordinating, directing and coordinating which included human behavior, human relations, communication, and leadership. Position and coordination, control and coordination.

In addition, there were factors hampered tidal flood prevention in Desa Alahair such were unrealized planning, unharmonious communication, and lack of budget of local government of Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keywords: Coordination, Prevention, Flood.

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 disebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Rangsang Barat, kecamatan Rangsang, kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan kecamatan Merbau. Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kepulauan Meranti dengan luas wilayah $\pm 3.707,84 \text{ km}^2$.

Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Selatpanjang, dengan luas wilayah $\pm 849,50 \text{ km}^2$. Selatpanjang merupakan kota yang menjadi transit transportasi laut dari Pekanbaru menuju Pulau

Batam atau Tanjung Balai Karimun dan sebaliknya. Secara geografis, Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Desa yaitu, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kelurahan Selatpanjang Selatan, dan Desa Sesap, Desa Banglas Barat, Desa Banglas, Desa Alahair, dan Desa Alahair Timur.

Sejarah awal mula terbentuknya Desa Alahair yaitu karena terdapat tiga buah parit besar yang dibuat oleh orang-orang tua pada era sebelum terbentuknya Desa. Parit tersebut dibuat karena Desa Alahair dikenal sebagai daerah yang sering tergenang air dan menyebabkan terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat. Banjir yang terjadi bukan hanya berasal dari air hujan namun juga dikarenakan banjir air pasang (rob). Apabila banjir rob sudah naik maka halaman rumah penduduk tergenang, sulitnya mendapatkan air bersih dan hasil tani masyarakat Desa tidak dapat dipanen.

Kawasan yang menjadi langganan banjir rob adalah di wilayah RW 01, RW 05 dan RW 06. Pada wilayah RW 06, Dusun III Jl. Belibis merupakan wilayah prioritas utama dalam pembangunan, karena di wilayah ini penduduknya sangat padat dan berhampiran dengan laut sehingga penduduk di wilayah tersebut tidak bisa bercocok tanam.

Tabel 1.1 Kawasan yang dilanda banjir di Desa Alahair tahun 2011-2015

No	Kawasan	Kondisi
1	RW 01	Halaman terendam, pertanian terendam
2	RW 05	Halaman terendam, pertanian terendam
3	RW 06, Dusun III, Jl. Belibis	Halaman terendam, pertanian terendam, dan jalan terendam

Sumber: Kantor Desa Alahair

Kemudian masalah infrastruktur juga menjadi permasalahan bagi masyarakat seperti drainase (parit beton) yang telah dibangun belum bisa menanggulangi banjir, apabila air pasang naik semua aktivitas penduduk terganggu bahkan hingga terhenti. Jalan di wilayah RW 06 tersebut tergenang air pasang hingga tidak bisa dilewati sama sekali. Banjir rob terjadi ketika air pasang naik di waktu pagi atau sore hari dan memakan waktu paling lama dua hari dan paling cepat adalah hanya hitungan jam untuk kembali surut. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah daerah yaitu dengan melakukan penimbunan jalan dan pembangunan drainase di beberapa titik daerah yang dilanda banjir rob.

Hal tersebut merupakan bentuk kebijakan yang dibuat untuk membantu masyarakat yang terkena banjir rob. Dalam melakukan upaya penanggulangan banjir rob tersebut terdapat pelbagai bidang Pemerintahan daerah yang saling berkoordinasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Desa Alahair.

Kebijakan yang dilakukan tersebut tidak berjalan dengan baik, dikarenakan adanya hambatan dalam melakukan upaya pembangunan drainase yang disebabkan oleh minimnya anggaran Pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Meranti

yang baru terbentuk, sehingga pekerjaan dan tanggung jawab dalam hal menanggulangi bencana masih di tangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara teknis urusan Pemerintahan yang dibantu oleh Desa Alahair sebagai penggerak yang lebih dekat dengan masyarakat Desa.

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peran penting sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah Kecamatan Tebing Tinggi khususnya dalam menanggulangi banjir rob di Desa Alahair. Dinas Pekerjaan Umum memiliki dua bidang organisasi yang berperan penting terhadap penanggulangan banjir rob tersebut, yaitu Bidang Bina Marga bergerak dalam melaksanakan pengkoordinasian di bidang perencanaan teknis pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Pengairan bergerak dalam melaksanakan pengkoordinasian sumber daya air, pembangunan sarana pengairan, pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian dan pemeliharaan sarana pengairan.

Desa berperan sebagai yang paling dekat dengan masyarakat untuk menerima pendapat dan keluhan tentang infrastruktur maupun masalah sekitar yang dialami oleh masyarakat. Keluhan dan masukan dari masyarakat yang diterima oleh pihak Desa merupakan peran yang harus cepat di tanggapi oleh pihak Desa khususnya dalam menanggulangi bencana banjir rob tersebut.

Tabel 1.2 Anggaran Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair

No	Tahun	Proyek Pembangunan	Sumber	Dana (Rp)
1	2011	Badan Jl. H. Umar Dusun II-III	ADD	Rp 26.000.000,-
2	2011	Sumur bor di RW 01, 05, 06	ADD	Rp 60.000.000,-
3	2012	Pembuatan turap papan Jl. Rumbia	ADD	Rp 8.777.000,-
4	2012	Pembuatan jalan papan (plantaran)	ADD	Rp 1.455.000,-
5	2012	Pembuatan turap papan Jl. Nelayan RW 06	ADD	Rp 7.630.000,-
6	2012	Duiker Jl. Rumbia RW 06	ADD	Rp 5.261.000,-
7	2013	Rehab berat drainase (parit beton) Jl. Rumbia RW 06	ADD	Rp 14.425.000,-
8	2013	Rehab Jl. Perjuangan RW 01	ADD	Rp 6.000.000,-
9	2013	Rehab drainase (parit beton) Jl. Rumbia (lanjutan)	ADD	Rp 7.505.000,-
10	2014	Duiker (gorong-gorong) Jl. Perjuangan	ADD	Rp 3.826.000,-
11	2014	Rehab Semenisasi Jl. Perjuangan	ADD	Rp 4.132.000,-
12	2015	Pembuatan Jalan Papan (plantaran) RW 06	ADD	Rp 11.140.000,-

Sumber: Laporan Aset Desa Alahair

Tabel 1.3 Anggaran Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair

No	Tahun	Proyek Pembangunan	Sumber	Dana (Rp)
1	2011	Pembangunan parit beton Jl. Alahair Gg. Pelajar II (300 meter)	APBD Kab (Dinas PU)	Rp 238.480.000,-
2	2011	Pembangunan parit beton Jl. Perjuangan Desa Alahair (634 meter)	APBD Kab (Dinas PU)	Rp 422.012.000,-
3	2012	Peningkatan Jl. Belibis RW 06 (800 meter)	APBD Kab. (Dinas PU)	Rp 633.010.000,-
4	2013	Pembangunan drainase Jl. Perjuangan Desa Alahair	APBD Kab. (Dinas PU)	Rp 1.046.331.040,-
5	2014	Peningkatan Jl. Perjuangan	APBD Kab. (Dinas PU)	Rp 574.340.882,-
6	2014	Pembangunan drainase Jl. Perjuangan	APBD Kab. (Dinas PU)	Rp 755.687.000,-
7	2015	Peningkatan Jl. Perjuangan	APBD Kab. (Dinas PU)	Rp 8.461.941.000,-

Sumber: Sub Bagian Program Pekerjaan Umum (PU)

Peristiwa banjir rob yang melanda Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2011 sampai 2015 telah menimbulkan

kerugian masyarakat setempat, diantaranya, rusaknya perkebunan, hasil tani yang tidak dapat di panen, sulit sarana air bersih, dan halaman

rumah warga yang tergenang air pasang laut. Banjir yang terjadi sangat memiliki dampak buruk bagi masyarakat, karena pada tahun tersebut warga sangat kesulitan air bersih dan tidak bisa bekerja sebagai nelayan, disebabkan ombak air laut

yang tinggi. Pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa Alahair adalah nelayan dan banjir rob tentu saja merupakan hambatan yang paling besar terjadi pada kehidupan mereka pada saat itu.

Tabel 1.4 Kerugian masyarakat dilanda banjir rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2011-2015

No	Lingkungan	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga Yang Dilanda Banjir ROB	Jenis Kerugian	Jumlah Kerugian
1	Dusun III	2011	231 KK	Pertanian sayuran, perkebunan, dan sarana air bersih	± 0,8 Ha
		2012	239 KK		± 0,8 Ha
		2013	241 KK		± 1 Ha
		2014	248 KK		± 1,2 Ha
		2015	256 KK		± 1,3 Ha

Sumber: Kantor Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi, tahun 2011-2015

Kondisi lingkungan atau masyarakat yang terkena dampak banjir rob selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, namun dari jumlah Kartu Keluarga (KK) yang terdata tersebut, hanya sebagian yaitu 30 hingga 50 KK yang memiliki lahan perkebunan dan pertanian sayur. Kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar Rp 3.500.000,-/KK disetiap tahunnya apabila terjadi banjir rob lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dimana pentingnya penyelenggaraan penanggulangan banjir rob, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu: “*Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan banjir rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015?
2. Apa saja faktor penghambat penyelenggaraan koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015?

C. LANDASAN TEORI

1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut George R. Terry (Hasibuan, 2006:2) merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Mempelajari manajemen harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, George R. Terry (dalam Yanti, 2016:18) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan (POAC) yaitu;

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (pengorganisasian)
- c. Actuating (penggerakan)
- d. Controlling (pengawasan)

2. Koordinasi Pemerintahan

Menurut (Ndraha, 2003) koordinasi Pemerintah merupakan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur Pemerintah yang berbeda beda pada dimensi waktu, tempat komponen, fungsi dan kepentingan, antar Pemerintahan dengan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan Pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

3. Manajemen Bencana

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling.

Menurut Kusumasari (2014:19-20) manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

E. PEMBAHASAN

1. Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015

Dalam rangka untuk melakukan penanggulangan banjir rob di Desa Alahair, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun rencana untuk saling berkoordinasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir rob. Instansi Pemerintah yang saling berkoordinasi dalam melakukan penanggulangan ini

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Desa Alahair.

Koordinasi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam Pemerintahan di Daerah, karena dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting.

Koordinasi yang akan dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan atau melakukan komunikasi, bertujuan untuk menyelaraskan pekerjaan dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada kajian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan koordinasi penanggulangan banjir rob pada tahap pasca bencana yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan banjir rob dan pemulihan sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan penanggulangan banjir rob di Desa Alahair dinas Pekerjaan Umum merupakan dinas yang bekerja melakukan penanggulangan sebelum adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2015. Kegiatan yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum tersebut ialah membuat parit beton (drainase) dan peningkatan jalan di beberapa titik jalan di wilayah terkena banjir rob tersebut. Dana pembangunan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penetapan anggaran pembangunan tersebut terlebih dahulu disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan hasil rapat bersama anggota yang disetujui oleh Bupati. Rangkaian kegiatan penanggulangan banjir rob telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penggerak dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Penyusunan anggaran tersebut dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan terhadap penanggulangan banjir rob tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Desa Alahair merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga keluhan yang dirasakan oleh masyarakat desa Alahair bisa disampaikan langsung kepada Kepala Desa maupun perangkat lainnya. Seperti banjir rob yang melanda di kawasan desa Alahair yang dinilai cukup parah karena terjadi disetiap akhir tahun membuat Desa Alahair ikut serta melakukan bentuk kegiatan penanggulangan banjir rob dengan cara membuat badan jalan, membuat sumur bor untuk mendapatkan air bersih, pembuatan turap papan, pembuatan jalan papan, duiker (gorong-gorong) dan rehab semenisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa Alahair untuk menanggulangi banjir rob tersebut dibantu oleh masyarakat dengan cara bergotong royong dan sumber dana yang digunakan untuk melakukan penanggulangan banjir rob tersebut adalah dari alokasi dana desa (ADD).

Penyelenggaraan penanggulangan banjir rob tersebut telah mencakup serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan terhadap

penanggulangan bencana, kegiatan pencegahan bencana, sikap tanggap darurat, dan rehabilitas. Kegiatan penanggulangan bisa dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang bertujuan dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri serta sarana dan prasarana dari dampak bencana.

Hubungan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan banjir rob melihat dari beberapa faktor yang berhubungan erat dan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Suatu perencanaan akan mempengaruhi koordinasi dari instansi yang terkait, karena semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melakukan koordinasi tersebut. Perencanaan yang berjalan dengan baik maka hubungan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek akan terkelompok dengan baik serta harmonis dan penerapan koordinasi antar instansi yang terkait akan berjalan dengan mudah.

Perencanaan dalam melakukan penanggulangan banjir rob ini sangat dibutuhkan dalam sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Komunikasi

Hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menanggulangi banjir rob ini dilakukan oleh beberapa instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Desa Alahair. Namun, komunikasi yang dilakukan kepada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah baru dilakukan pada akhir tahun 2015 karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut baru terbentuk pada akhir tahun 2015. Hal tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggulangi banjir rob, karena diatasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.

3. Pengarahan

Pengarahan juga memiliki suatu kaitan yang penting dalam sebuah koordinasi karena dengan adanya arahan yang baik dari seorang pimpinan maka koordinasi yang dijalin akan berjalan dengan baik. Seorang pimpinan biasanya memiliki variasi dalam memberikan arahan kepada anggota kelompoknya dan pengarahan yang dilakukan tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar tergantung kepada anggota yang menerima arahan tersebut.

Pengarahan dilakukan oleh kepala pimpinan dari masing-masing instansi tersebut dapat berpengaruh baik terhadap jalannya koordinasi penanggulangan banjir rob apabila pengarahan yang disampaikan itu benar dan mudah diterima bagi anggota kelompok, dan pengarahan tidak hanya diterima oleh kepala pimpinan atau kelompok saja melainkan juga dari Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan dukungan dan motivasi bagi lembaga dinas yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penanggulangan banjir rob.

4. Pengendalian.

Pengendalian yang dilakukan oleh seorang pimpinan bukan hanya

melihat dari pekerjaan seorang anggota kelompoknya, namun hal lain juga diperhatikan seperti pengendalian keuangan, pengendalian produksi, pengendalian waktu, pengendalian teknis, dan pengendalian kebijaksanaan. Bentuk pelaksanaan pengendalian untuk menjalin koordinasi yang kuat juga telah dilakukan oleh masing-masing instansi yang melakukan penanggulangan banjir rob.

Pengendalian yang diutamakan dalam menanggulangi banjir rob di Desa Alahair ini yaitu pengendalian waktu dan keuangan, karena jika pengendalian waktu tidak diperhatikan maka pengerjaan pembangunan drainase dan lain sebagainya yang telah direncanakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik.

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dalam pengendalian.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan.

2. Faktor penghambat penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015

1. Tidak terealisasinya perencanaan dengan baik
Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

2. Tingkat komunikasi yang lemah

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor yang menentukan tingkat keberhasilan lembaga dinas bersama masyarakat. Komunikasi adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil komunikasi tersebutlah seseorang dapat menilai dan melihat apa saja faktor yang menghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.

3. Minimnya anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Anggaran merupakan hal yang paling sensitif dalam melakukan semua kegiatan, karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran. Namun, dalam hal ini anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memang dapat dikatakan minim dan pengeluaran yang dibutuhkan juga sangat besar dan itu menyebabkan pelaksanaan penanggulangan banjir rob menjadi terkendala dan lama.

Hal tersebut melihat bahwa pengendalian terhadap keuangan butuh dilakukan. Apabila pemasukan

seimbang dengan pengeluaran maka pencapaian tujuan kerja akan lebih mudah dilakukan, namun apabila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan menyebabkan terkendalanya suatu pekerjaan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab III yaitu tentang hasil penelian dari Koordinasi dan faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi penanggulangan banjir rob di Desa Alahair dilaksanakan atas beberapa fungsi yang saling berhubungan yaitu perencanaan dan koordinasi, pengorganisasian dan koordinasi, pengarahan dan koordinasi yang meliputi tingkah laku manusia, hubungan manusiawi, komunikasi, dan kepemimpinan. Pengisian jabatan dan koordinasi, dan pengendalian dan koordinasi. Kelima hubungan tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan banjir rob di Desa Alahair. Penanggulangan dilakukan oleh beberapa dinas terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti, Dinas Pekerjaan Umum dan Desa Alahair.

2. Faktor penghambat penanggulangan banjir rob di Desa Alahair terdiri dari tidak terealisasinya perencanaan dengan baik, tingkat komunikasi yang tidak harmonis, dan minimnya anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Saran

1. Pemerintah daerah dan instansi yang terkait harus lebih kuat dalam menjalin koordinasi khususnya dalam menanggulangi banjir rob di Desa Alahair tersebut. Pemerintah harus siap tangggap menerima dan mencari informasi terkait bencana tersebut.
2. Masyarakat Desa Alahair juga harus bisa sama-sama menjalin kerja sama yang baik untuk tercapainya harapan menanggulangi banjir rob tersebut agar tidak terus terjadinya abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan:

- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFPE.
- Hasibuan, Melayu. S.P (2006). *Managemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi revisi 1 Cetakan kelima)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan Adikoesoemo. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dkk. (2005). "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan", Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana. (1998). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca.
- _____ (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Warto, Agus T, Sunit. & Nugroho P, Pantyo. (2002). *Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kepulauan Meranti.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Skripsi:**
- Desi Nova Yanti. 2012. *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Buatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2007-2015*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Rina Mariana. 2010. *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Di Kecamatan Sungai Mandau*

Tahun 2013. Pekanbaru.
Universitas Riau.

Wahyu Rio Santoso. 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Bendungan Cipta Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.Pekanbaru.
Universitas Riau.

Renny Febrin. 2012. Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Utara Tahun 2013-2015. Pekanbaru. Universitas Riau.

Jurnal:

Rita, 2014. Keefektifan Kerja sama Antarlembaga Dalam Operasi Pemulihan Bencana Alam Banjir Studi Empirik Di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Universitas Binus.

Ismanudin, 2014. Teori Dan Implementasi Manajemen Pemerintahan. Indramayu. Fisip UNWIR Indramayu.

Abdul Latief, 2015. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo.Makassar. Universitas Hasanuddin